

PENGELOLAAN, PENGINTEGRASIAN, DAN PEMANFAATAN DATA
BAHASA DAN SASTRA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KEBAHASAAN YANG BERKEINDONESIAAN

Mahsun

Universitas Mataram
mahsunirn@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang nasionalisme dibangun di atas fondasi bahasa, bukan di atas fondasi kesamaan ras/suku bangsa atau agama. Oleh karena itu, keragaman data kebahasaan harus dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Makalah ini membahas hal yang berhubungan dengan wujud, pengelolaan, dan pengintegrasian serta pemanfaatan data kebahasaan sebagai bahan perumusan kebijakan kebahasaan serta implementasinya dalam rangka membangun kemandirian bangsa melalui: (a) penguatan peran bahasa negara, (b) penguatan peran bahasa lokal/daerah, dan (c) pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

Kata-kata Kunci: nasionalisme, ras, suku bangsa, agama, kemandirian, strategi, diplomasi

Abstract

Indonesia is a nationalism country built on the basis of language, not on race, ethnicity or religion. Therefore, the variety of languages should be managed well and used as a source to formulated and implement the indonesia-language policy. This paper discusses matters relating to form, management, integration, and the implementation of language policy as a source to formulate language policy and the implementation to nation building independence through: (a) strengthening the national language role, (b) strengthening the role of local languages, and (c) developing language strategy and diplomacy

Keywords: nationalism, race, ethnicity, religion, independence, strategy, diplomacy

1. Latar Belakang

Ketika berbicara negara bangsa, maka yang terlintas dalam alam pikiran kita adalah penyatuan berbagai komunitas/suku bangsa yang berbeda dalam satu kesatuan sistem ideologi, teritori, politik/pemerintahan, pertahanan, dan sosial serta budaya. Sementara itu, penyatuan tersebut hanya mungkin terwujud jika antarkomunitas/suku bangsa yang berbeda-beda itu memiliki benang-benang pengikat yang dapat mempersatukan mereka. Terdapat tiga elemen yang dapat dipilih untuk menjadi benang pengikat atau landasan yang dapat mempersatukan berbagai komunitas/suku bangsa dalam satu kesatuan negara bangsa atau nasionalisme negara bangsa, yaitu ras/suku bangsa, agama, dan bahasa (Anwar, 2008). Terdapat banyak contoh negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi ras, misalnya negara-negara di Afrika, seperti Afrika Selatan. Jika elemen ras yang dipilih, betapa sulit bangunan nasionalisme Indonesia akan ditegakkan. Bayangkan, jika berpatokan pada bahasa sebagai penanda identitas ras (suku bangsa) maka berdasarkan identifikasi bahasa lokal di Indonesia yang berjumlah 659 buah bahasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2014), dapat dikatakan bahwa ada 659 sukubangsa yang terdapat di Indonesia. Dari 659 suku bangsa itu, suku bangsa manakah yang dipilih sebagai representasi keindonesiaan

negara bangsa Indonesia? Suatu pilihan yang sangat sulit, boleh jadi pilihan itu justru menempatkan cita-cita membangun NKRI hanya sebatas angan-angan belaka.

Pengalaman Indonesia ketika gerakan memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa modern yang sejajar dengan bahasa dunia lainnya, pada kisaran tahun 1970-an sampai dengan tahun 1988, para perekayasa bahasa melalui institusi kebahasaan Badan Bahasa banyak menyerap kosakata bahasa Jawa muncul kritikan dengan menyatakan, “Telah terjadi proses penjawaan dalam bahasa Indonesia”. Kritikan tersebut menggambarkan tolakan dominasi suku bangsa tertentu dalam membangun keindonesiaan. Artinya, elemen suku bangsa atau ras tidak mungkin menjadi fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia. Begitu pula dengan elemen agama, ada banyak negara bangsa yang menjadikan agama sebagai elemen pengikat nasionalismenya. Bahkan nama agama itu dijadikan nama negaranya, misalnya Republik Islam Iran, yang menjadikan agama Islam sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsanya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Persoalannya, agama manakah yang akan menjadi fondasi atau benang pengikat dalam membangun nasionalisme keindonesiaan. Katakan, dipilih Islam karena agama ini adalah agama mayoritas. Pengalaman sejarah ketika rumusan sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”, tujuh kata terakhir pada redaksi sila pertama itu dihapuskan sehingga muncullah bunyi Pancasila seperti dikenal sekarang: “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah memberikan pelajaran pada bangsa ini bahwa betapa arifnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih agama sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Itu sebabnya pula, sehebat apa pun gerakan yang ingin mengubah fondasi nasionalisme Indonesia dengan berdasarkan agama pasti akan mendapat tolakan yang kuat, sebagaimana gagalnya beberapa gerakan yang ingin membentuk negara agama, seperti yang dilakukan para separatis DII/TII.

Suatu hal yang menarik adalah dipilihnya bahasa sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari kesadaran akan pengakuan atas kesatuan tanah air yaitu tanah air Indonesia meskipun terdiri atas tidak kurang tujuh belas ribu tanah air (pulau) dan kesatuan bangsa meskipun terdiri atas tidak kurang dari 659 (suku) bangsa. Suku bangsa yang berpencar-pencar yang mendiami pulau yang tujuh belasan ribu tersebut diyakini mampu direkatkan dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa menjadi benang pengikat dalam membangun nasionalisme Indonesia. Dalam konteks ini, menjadi amat penting dan benar pengakuan mantan perdana menteri Singapura, Lee Kuan Yew dalam bukunya: *One Man's View of the World*, yang menyatakan bahwa pada tahun 1998, ketika runtuhnya kekuasaan Orde Baru, tidak ada satu orang pun pejabat di negara itu yang tidak meramalkan di Indonesia pada saat itu akan terjadi balkanisasi. Indonesia akan hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, boleh jadi akan mengikuti asalnya dari beberapa ratus negara bangsa yang berupa kerajaan/kesultanan. Namun, ramalan itu jauh dari kebenaran. Lalu apa yang membuat Indonesia masih bertahan seperti sekarang ini? Lee Kuan Yew menjawabnya dengan menyatakan bahwa Indonesia telah diwarisi satu hal yang tiada ternilai oleh para pendiri bangsanya, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam konteks itulah bahasa nasional, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membangun nasionalisme keindonesiaan. Namun demikian, tidak hanya bahasa Indonesia yang menjadi elemen pembentuk nasionalisme keindonesiaan, tetapi juga bahasa-bahasa lokal pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk

nasionalisme keindonesiaan. Hal itu terungkap dari penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang dinyatakan bahwa, “Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”, adapun: “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara...” Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa nasionalisme keindonesiaan tidak hanya dibangun di atas bahasa nasional tetapi juga dibangun di atas bahasa-bahasa lokal. Apabila bahasa Indonesia merefleksikan keberagaman dalam kesatuan (pilar NKRI), maka bahasa-bahasa lokal merefleksikan kesatuan dalam keberagaman (pilar Bhinneka Tunggal Ika). Bahkan sebegitu pentingnya keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa lokal dalam membangun nasionalisme negara bangsa Indonesia, Mahsun (2015), mengusulkan elemen bahasa tidak hanya sebagai elemen pembentuk nasionalisme keindonesiaan, tetapi juga bahasa menjadi salah satu pilar dari keempat pilar negara bangsa Indonesia: UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Bahasa itu sendiri yang berdiri kokoh di atas fondasi negara, yaitu Pancasila.

Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi nasionalisme bahasa, dalam konteks perang konsepsi/ideologi (*proxy war*), Indonesia mengalami “gempuran” dari bahasa pula. Berbagai isu kebahasaan yang dihubungkan dengan politik kebangsaan, seperti yang muncul di kawasan Indonesia Timur dengan isu kemelanesiaannya, di kawasan Barat Indonesia dengan isu kemelayuannya, dan kawasan tengah Indonesia dengan pemanfaatan isu otonomi daerah memberikan gambaran pada bangsa Indonesia betapa bangsa ini haruslah mengelola secara arif keberagaman bahasanya dalam satu kebijakan strategis kebahasaan demi keutuhan NKRI. Dengan kata lain, diperlukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan data kebahasaan (bahasa dan sastra) dalam rangka pengembangan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini dapat dirumuskan berikut ini.

- a. Bagaimanakah wujud data kebahasaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan?
- b. Bagaimanakah mengelola data kebahasaan (bahasa dan sastra) bagi perumusan kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan?
- c. Bagaimanakah memanfaatkan data kebahasaan dalam implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan?

3. Ihwal Kebijakan Kebahasaan yang Berkeindonesiaan

Kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah arah pembangunan bidang kebahasaan yang dapat menjadikan salah satu penopang bangunan negara Indonesia yang memiliki kemandirian/kedaulatan sebagai sebuah negara bangsa yang keberadaannya diakui negara bangsa lainnya di dunia. Sementara itu, kemandirian bangsa, yang dimaknai sebagai hal atau keadaan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, mempersyaratkan bahwa negara bangsa itu dapat tampil sebagai sebuah negara bangsa dengan keutuhannya, yang tidak hanya menyangkut keutuhan dari aspek teritorial, ekonomi, pertahanan, politik, sosial, budaya, tetapi juga menyangkut keutuhan sebagai sebuah komunitas negara bangsa

yang memiliki identitas/jati diri. Salah satu identitas dan jati diri itu adalah bahasa, baik itu bahasa negara maupun bahasa daerah (Mahsun, 2015).

Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi salah satunya fondasi bahasa, maka pemanfaatan potensi kebahasaan untuk menegakkan kemandirian bangsa Indonesia perlu mendapat perhatian, yang dalam hal ini tidak hanya bahasa negara tetapi juga bahasa-bahasa lokal/bahasa daerah. Kebijakan penanganan segala potensi bahasa tersebut hendaknya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi masing-masing jenis bahasa yang dirumuskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam hubungannya dengan bahasa negara, penguatan peran bahasa Indonesia baik di dalam negara maupun di luar negara haruslah diletakkan pada kerangka berpikir menghadirkan negara dalam negara itu sendiri dan menghadirkan negara di negara lain dalam tata pergaulan global. Strategi operasionalnya haruslah menyentuh aspek psikologis warga negara Indonesia yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sekadar sarana komunikasi, tetapi lebih penting dari itu adalah bahwa dalam bahasa Indonesia hadir keindonesiaan itu sendiri. Peran-peran historis bahasa Indonesia dalam membangun keindonesiaan hendaknya senantiasa menjadi kompas dalam berperilaku setiap warga negara Indonesia. Begitu pula kehadiran bahasa Indonesia di luar negara membuktikan kehadiran negara dalam percaturan dunia global. Kebijakan utama yang dilakukan dalam rangka memperkuat kehadiran negara di dalam atau di luar negara, adalah melalui kegiatan pendidikan serta penguatan kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan melalui jalur partisipatori.

Selanjutnya, bahasa lokal/daerah memainkan peran yang sangat penting dalam membangun keindonesiaan. Melalui bahasa-bahasa lokal mampu dirunut secara maknawi bagi keberadaan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Boleh jadi, kehilangan satu saja bahasa daerah, tertentu yang memiliki peran penjelas yang memperantarai relasi kekerabatan bahasa-bahasa daerah yang lain, berarti kehilangan mata rantai yang sangat berharga bagi penjelasan makna kebhinnekaan dalam ketunggalikaan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, jika tidak ditemukan bukti-bukti kebahasaan dalam bahasa Namblong dan Kafoa di Papua betapa akan sulit menjelaskan keterhubungan antara bahasa Tarfia dan bahasa Tobati dengan bahasa Gresi (Mahsun, 2015). Artinya, kajian-kajian strategis yang berhubungan dengan jumlah bahasa dan variannya, relasi kekerabatan antarbahasa daerah, interaksi antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tercermin lewat bahasa, kesepadanan adaptasi sosial antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tercermin dalam bahasa yang digunakannya, loyalitas bahasa dalam hubungannya dengan loyalitas kewarganegaraan masyarakat di wilayah perbatasan, cara pandang masyarakat tutur bahasa daerah dalam memandang keberadaannya dan keberadaan komunitas tutur bahasa daerah lain yang tercermin dalam bahasa yang digunakan mutlak dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan bangsa dari aspek kebahasaan. Untuk itu, terkait dengan pemaparan aspek peengelolaan dan pemanfaatan data kebahasaan dalam pengembangan dan pengimplementasian kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan dalam makalah ini ditujukan pada:

- a. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa Indonesia;
- b. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa lokal/daerah;
- c. membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

4. Pembahasan

4.1 Wujud dan Pengelolaan Data Kebahasaan

Munculnya berbagai subbidang dalam linguistik/ilmu bahasa dan ilmu sastra pada dasarnya menuntun pada kenyataan bahwa terjadinya berbagai sudut pandang dalam melihat data bahasa dan data sastra. Dalam linguistik terdapat pembagian bidang/subbidang keilmuan atas linguistik mikro, linguistik makro (Kridalaksana, 2008). Untuk bidang linguistik mikro terdapat subbidang fonologi, morfologi, sintaksis, teks, dan semantik; sedangkan untuk bidang linguistik makro terdapat di dalamnya antara lain subbidang interdisipliner: sosiolinguistik, antropinguistik/linguistik kebudayaan, genolinguistik, linguistik diakronis dan lain-lain. Pada bidang linguistik mikro, subbidang fonologi memusatkan diri pada data kebahasaan yang menyangkut elemen terkecil bahasa yaitu bunyi, suku kata, dan kata; subbidang morfologi memusatkan diri pada data yang berupa morf, morfem bebas, morfem terikat, proses-proses pembentukan kata; subbidang sintaksis memokuskan diri pada data kebahasaan yang berada di atas kata, seperti frasa, klausa, dan kalimat; subbidang teks atau waacana memokuskan diri pada satuan bahasa di atas kalimat, seperti paragraf dan teks itu sendiri serta satuan-satuan gramatis yang berupa konjungsi penghubung antarkalimat dalam membentuk paragraf dan penghubung antarparagraf dalam membentuk teks; subbidang semantik adalah subbidang yang memokuskan diri pada makna satuan-satuan bahasa, mulai dari satuan morfemis terkecil yang mengandung makna sampai pada satuan kebahasaan terbesar. Untuk bidang linguistik makro, seperti subbidang sosiolinguistik memusatkan diri pada variasi kebahasaan yang disebabkan faktor sosial (Hudson, 1998); subbidang linguistik kebudayaan memokuskan diri pada kajian bahasa dalam hubungannya dengan budaya, seperti kajian tentang konsep ruang, waktu, sistem kekerabatan, konsep tentang warna dll. (periksa, Foley, 1998 dan Brundi, 1997), subbidang linguistik diakronis yang di dalamnya terdapat subbidang dialektologi diakronis dan linguistik historis komparatif. Kedua subbidang linguistik diakronis ini sama-sama mengkaji variasi bahasa, hanya saja bedanya variasi bahasa yang dikaji dalam dialektologi diakronis adalah variasi dialektal, yaitu variasi yang terdapat dalam satu bahasa; sedangkan variasi bahasa yang dikaji dalam linguistik historis komparatif adalah variasi bahasa yang berada pada tingkat isolek yang disebut bahasa, jadi bersifat variasi antarbahasa yang berkerabat. Selain itu, keduanya bertujuan akhir merekonstruksi bahasa purba yang menurunkan varian-varian tersebut (Mahsun, 1995 dan 2010). Adapun subbidang genolinguistik merupakan kajian yang memadukan hasil analisis secara genetis dan secara linguistik penutur bahasa dan bahasa yang diperbandingkan dengan tujuan untuk menentukan relasi kekerabatan populasi penutur bahasa-bahasa tersebut (Mahsun, 2010). Patut ditambahkan bahwa unit kebahasaan yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi data kebahasaan dalam linguistik makro/interdisipliner di atas adalah unit-unit kebahasaan yang menjadi fokus kajian linguistik mikro, hanya penjelasannya diberikan atas dasar perspektif bidang ilmu yang menjadi mitra kajian linguistik interdisipliner tersebut, misalnya terjadinya perbedaan leksikal untuk merealisasikan makna yang sama dalam suatu bahasa dengan memberikan penjelasan dari aspek sosial masyarakat seperti munculnya sistem tingkat tutur dalam bahasa Jawa, Bali, Sasak dll., atau munculnya perbedaan konsep waktu antara bahasa tertentu dengan bahasa lain yang diberikan penafsiran dari aspek cara masyarakat itu memandang keberadaan manusia dalam dimensi waktu, seperti yang dilakukan dalam kajian linguistik kebudayaan (Mahsun, 2009).

Selanjutnya, untuk bidang ilmu sastra, terdapat subbidang yang mengkaji bentuk karya sastra dari segi struktur internal pembentuk suatu karya sastra, seperti yang dilakukan dalam kajian ilmu sastra murni, di samping ada kajian berupa deskripsi

bentuk-bentuk ekspresi sastra yang muncul dalam masyarakat tutur bahasa tertentu, misalnya deskripsi bentuk-bentuk ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Jawa dll., selanjutnya, dihubung-bandingkan satu sama lain untuk menelusuri asal persebaran bentuk ekspresi sastra tertentu yang memiliki pertalian historis. Data kebahasaan dan hasil olahan yang dilakukan melalui pemanfaatan perspektif bidang/subbidang ilmu bahasa dan ilmu sastra yang digambar secara sepintas di atas tentu sangat bermanfaat dalam menentukan kebijakan serta implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Sebagai contoh: data kebahasaan yang berupa hasil kajian fonologi dapat dikelola menjadi bahan pengembangan sistem tata tulis/aksara dalam bahasa itu; data kebahasaan yang berupa hasil kajian morfologi, sintaksis, semantik, dan teks dapat dikelola menjadi bahan pengembangan tata bahasa bahasa tersebut; data kebahasaan hasil kajian subbidang interdisipiner linguistik seperti sosiolinguistik, antropolinguistik/linguistik kebudayaan dapat dikelola menjadi bahan pemahaman akan interaksi sosial dan cara pandang masyarakat penutur bahasa itu; data kebahasaan hasil kajian genolinguistik dan genolinguistik dapat dikelola menjadi bahan pemahaman akan keberagaman suku bangsa yang tercermin dalam keberagaman bahasa dan gen tetapi berasal dari asal yang sama. Termasuk ke dalam pemanfaatan hasil pengelolaan yang dapat dikembangkan menjadi bahan pemahaman keberagaman suku bangsa tersebut adalah hasil kajian ilmu sastra khususnya sastra bandingan historis. Semua hasil pengelolaan data kebahasaan tersebut dapat menjadi bahan dalam membangun kemandirian bangsa melalui kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan, khususnya melalui jalur pendidikan. Untuk bahan yang berupa hasil pengelolaan yang berupa sistem tata tulis dan tata bahasa dapat menjadi materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas berbahasa, sedangkan bahan pengelolaan yang berupa keberagaman bahasa dan gen, termasuk keberagaman ekspresi sastra pada setiap komunitas tutur bahasa tertentu dapat menjadi bahan pembelajaran pembentukan karakter yang berkeindonesiaan. Secara jelas ihwal pemanfaatan hasil pengelolaan data kebahasaan di atas dipaparkan dalam seksi berikut ini.

4.2 Pemanfaatan Data Kebahasaan dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Kebahasaan yang Berkeindonesiaan

Data kebahasaan yang dimaksudkan di sini tidak hanya menyangkut data kebahasaan Bahasa dan sastra Indonesia tetapi juga menyangkut data kebahasaan bahasa dan sastra daerah. Selain itu, tidak semua data kebahasaan yang menyangkut berbagai aspek/bidang kajian kebahasaan yang akan dibahas di sini melainkan beberapa saja yang menjadi contoh perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Untuk itu, dalam seksi ini akan dipaparkan ihwal pemanfaatan data kebahasaan dalam rangka perumusan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa Indonesia;
- b. membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa lokal/daerah;
- c. membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

Untuk lebih sistematisnya pembahasan ketiga hal tersebut dipaparkan secara berturut-turut dalam seksi-seksi berikut ini.

4.2.1 Pemanfaatan Data Kebahasaan dalam Membangun Kemandirian Bangsa melalui Penguatan Peran Bahasa Indonesia di dalam Negara

Sebagaimana dimaklumi bahwa negara-negara bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dengan keunggulan ekonominya diawali dari politik identitas, yang selanjutnya identitasnya disebar ke luar negara setelah bangunan fondasi dalam negaranya sudah mapan. Oleh karena itu, kehadiran negara yang ditandai kehadiran bahasa negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menjaga keutuhan teritorial, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, serta pertahanan bangsa. Mengapa demikian, karena bahasa nasional/bahasa negara bagi suatu negara bangsa merupakan identitas negara bangsa tersebut, termasuk negara bangsa Indonesia dengan bahasa nasional/bahasa negaranya bahasa Indonesia. Sebagai identitas maka kehadirannya akan menjadi penanda kehadiran negara. Artinya, kehadiran bahasa Indonesia dalam forum-forum atau peristiwa berbahasa yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya akan menjadi indikator kehadiran negara. Berangkat dari pemahaman di atas, maka bangsa ini mestinya prihatin dan bersedih ketika menyaksikan pemakaian bahasa asing di luar ruang pada hampir seluruh wilayah NKRI, yang kurang terkendali. Berbagai jenis spanduk, papan nama yang terpampang di jalan-jalan, di tempat-tempat pemukiman, di area pendidikan dari satuan pendidikan terendah sampai satuan pendidikan tertinggi, tempat-tempat pemukiman menunjukkan ketidakhadiran negara melalui bahasa negaranya. Hal yang serupa tidak hanya terjadi di kota-kota besar, seperti di ibukota negara, tetapi juga sampai ke ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota, kecamatan, dan desa-desa. Sepertinya, anak bangsa ini sudah tidak risih dengan kondisi tersebut, padahal yang dikomunikasikan itu ditujukan kepada anak-anak bangsa yang sudah memiliki bahasa negaranya sendiri. Bahkan ironisnya, penggunaan bahasa asing itu sering tidak dipahami oleh yang membacanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa bangsa ini tengah dilanda krisis identitas. Bangsa ini nyaris gagal dalam membangun kemandiriannya melalui penguatan identitas yang berupa bahasa negara di negaranya sendiri. Tidak mandiri karena harus menggunakan bahasa lain untuk mengomunikasikan sesuatu pada sesama anak bangsa, padahal jauh sebelum merdeka para pemuda bangsa ini, tepatnya 28 Oktober 1928, telah menyepakati sebuah bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kondisi di atas diperparah lagi dengan kurangnya keteladanan dalam penegakan identitas melalui pemakaian bahasa negara/nasional. Para tokoh panutan, pihak-pihak yang diharap menjadi contoh, belum mampu memainkan peran kepanutannya. Anak-anak bangsa ini hampir-hampir kehilangan tokoh panutannya dalam memantapkan identitas keindonesiaan. Padahal, melalui identitas kebahasaan berupa bahasa Indonesia itu telah mampu merevolusi mental para anak muda pencetus Sumpah Pemuda, dari mental ketergantungan, keterjajahan, keterberaian menjadi anak bangsa yang bermental mandiri, bebas merdeka dalam menentukan nasib bangsa, dan mental keberagaman dalam kesatuan.

Realita penampakan identitas keindonesiaan dalam wujud bahasa kebangsaan tersebut semuanya merupakan potret dari dunia pendidikan. Maraknya pemakaian bahasa asing yang digambarkan di atas merupakan wujud dari kegagalan dunia pendidikan dalam menanamkan pemahaman akan peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun negara bangsa. Kemudian, maraknya pemakaian bahasa Indonesia yang kurang tertib dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sesuai dengan konteksnya menggambarkan dunia pendidikan kita juga gagal memahami kaidah pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahkan hasil survei The Organization of Economic Co-operation and Development, melalui program PISA-nya (Programme for International Student Assessment) tahun 2012 dan 2015, menunjukkan bahwa hanya 1,5% siswa Indonesia yang mampu memecahkan soal-soal yang memerlukan

pemikiran—itu pun hanya sampai level keempat, belum sampai level keenam—sedangkan sisanya 98,5% hanya mampu memecahkan soal yang bersifat hafalan. Lemahnya kemampuan berpikir anak-anak Indonesia itu pun menunjukkan kegagalan dunia pendidikan dalam membelajarkan bahasa Indonesia. Bukankah bahasa, di samping sebagai sarana berpikir juga berperan sebagai pembentuk pikiran manusia. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia gagal membentuk pikiran manusia Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan kebijakan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negara dalam rangka membangun kemandirian bangsa. Sementara itu, keberhasilan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negara menjadi indikator kehadiran negara di dalam negaranya sendiri. Untuk itu, penguatan bahasa Indonesia di dalam negara, peran dunia pendidikan sangat penting. Kebijakan penguatan peran bahasa Indonesia untuk membangun kemandirian bangsa dalam bidang kebahasaan perlu ancangan pembaruan seperti berikut.

a. Penguatan Bahasa Indonesia melalui Jalur Pendidikan Formal

Dengan mempertimbangkan persoalan kebahasaan bahasa Indonesia di dalam negara yang semuanya merupakan potret dari dunia pendidikan, seperti digambarkan di atas, maka pembenahan pembelajaran bahasa Indonesia haruslah menjadi prioritas utama. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa penguatan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan lebih terencana, terarah, dan terukur. Pembenahan dimaksud haruslah menyangkut keempat standar yang tercakup dalam kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Terkait dengan standar kompetensi, maka kompetensi lulusan yang harus diletakkan sebagai capaian pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya ditujukan agar siswa harus memiliki kompetensi sikap positif terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaannya dan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk merefleksikan kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis. Dengan capaian kompetensi sikap positif, maka diharapkan anak bangsa ini akan selalu mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia sesuai konteks dan situasi yang dipersyaratkan. Adapun pencapaian kompetensi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai refleksi kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis yang ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia pada segala ranah, termasuk ranah pemakaian bahasa di luar ruang, terhindar dari ketidaktertiban. Ketidaktertiban dari kaidah ejaan, gramatika kebahasaannya dan ketidaktertiban dari kaidah logika berpikirnya.

Untuk mencapai kompetensi lulusan di atas, diperlukan materi sebagai isi pembelajarannya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi sesuai standar kompetensi yang hendak dicapai. Secara garis besar, untuk pemenuhan kompetensi sikap positif, maka diperlukan materi-materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membentuk keindonesiaan. Materi-materi itu tentu haruslah diperoleh melalui penelitian yang mampu menghimpun data-data/bukti kesejarahan bahasa Indonesia dalam tiga fase historis terbentuknya nasionalisme, bangsa, dan negara Indonesia, seperti dikemukakan Anwar (2008) berikut ini:

- a. fase pembentukan konsep kebangsaan,
- b. fase pergerakan kemerdekaan, dan
- c. fase penanaman identitas.

Dalam materi sejarah bahasa Indonesia pada fase pembentukan konsep kebangsaan dapat dimuat hal-hal, di antaranya berterkaita dengan:

- a. Uraian genetika-historis bahasa Indonesia (BI) yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi historisnya, yang spirit/roh awalnya mulai terbentuk dengan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara: Portugis (pertengahan abad XVI, dilanjutkan Belanda pada akhir abad ke-XVI).
- b. Uraian yang memberi penekanan bahwa imperialisme dapat berlangsung di Nusantara dalam waktu yang lama (3,5 abad) di satu sisi karena keberbedaan bahasa, ras, dan agama. Untuk itu perlu ada satu bahasa yang melintasi keberbedaan bahasa tersebut.
- c. Uraian yang berisi pengalaman bersama dalam keterjajahan mampu diekspresikan dengan baik sehingga muncul sikap kesamaan, senasib, dan sepenanggungan dengan satu medium utama, yaitu BI.
- d. Uraian yang memperlihatkan BI menjadi bahasa kebangsaan yang membentuk daya tahan nasionalisme keindonesiaan yang tangguh. Tekanan pada uraian ini dapat dilakukan dengan membandingkan peran BI tersebut dengan bahasa Romawi yang punya sejarah besar sebagai sebuah bangsa, namun mengalami kegagalan bahasa.
- e. Uraian yang memuat puncak capaian BI sebagai bahasa nasionalisme yang tergambar pada ekspresi awal munculnya gagasan kemerdekaan, seperti munculnya organisasi kepemudaan, propaganda melalui media, orasi tokoh pergerakan telah menjadikan BI sebagai senjata utama dalam membangun kesadaran kebangsaan dan spirit perjuangan.
- f. Uraian yang memuat pernyataan bahwa Sumpah Pemuda (1928) telah menggunakan isu sentral yang sangat tepat: (1) ketanahairan, (2) kebangsaan, dan (3) kebahasaan. Uraian ini harus diberi tekanan dengan menganalogikan jika pilihan Sumpah Pemuda itu didasarkan pada komposisi ras dan agama, maka pilihan itu sangat rentan bagi ketahanan nasional.
- g. Uraian yang memuat bahwa pada fase ini BI telah menunjukkan gejala kuat sebagai spirit bangsa dalam pergerakan kemerdekaan, yang ditandai tiga hal: (1) berkembangnya pendidikan berbahasa Indonesia, (2) berkembangnya media surat kabar berbahasa Indonesia, dan (3) munculnya sastra fenomenal berbahasa Indonesia.

Dalam materi sejarah BI pada fase pergerakan kemerdekaan dapat dimuat hal-hal yang terkait dengan:

- a. Uraian yang memuat tentang teretusnya Sumpah Pemuda 1928 merupakan awal dari fase BI menjadi alat utama dalam memaknai realitas dunia baru bagi nusantara.
- b. Uraian yang berisi tanggung jawab BI dalam mentransmisi terbentuknya harapan masyarakat nusantara untuk merdeka, seperti upaya memperkaya daya ungkap BI dengan menyerap kosakata bahasa nusantara atau bahasa asing, kemampuan kata dan komposisi kalimat yang mampu menangkap sentimen kebangsaan yang kuat dan meyakinkan rakyat untuk bereaksi. Untuk hal ini perlu kajian kosakata dan bangun komposisi kalimat bahasa-bahasa yang digunakan para pejuang kemerdekaan.
- c. Uraian yang memuat kemampuan BI menjadi identitas induk yang tumbuh dalam konteks sosial, yang berfungsi dalam interaksi politik untuk menciptakan sebuah realitas dinamik: (1) dari komunitas yang terberai dalam satu kesatuan kebangsaan, (2) dari komunitas terjajah yang mampu menyuarakan kemerdekaan, dan (3) dari komunitas yang tanpa identitas bersama menjadi komunitas dengan identitas pemersatu yang menjadi dasar berkembangnya interaksi dan relasi nasional.
- d. Uraian yang bertumpu pada pembuktian BI memenuhi pandangan Kroskirty dalam Anwar (2008), bahwa penggunaan BI pada fase itu dapat dimaknai sebagai:
 1. Kesengajaan untuk melakukan pembentukan nasionalisme bangsa Indonesia,
 2. Strategi manipulasi lemahnya struktur kesatuan nusantara, dan
 3. Kesadaran nyata dalam membentuk identitas bersama secara nasional; yang berbeda dengan negara yang membangun karakter nasionalismenya dengan fokus pada

kebebasan individu untuk manipulasi sistem sosial secara fleksibel, yang termanipulasi dalam ras dan kasta.

Adapun dalam materi sejarah BI pada fase penanaman identitas, seperti dipaparkan Anwar (2008) hendaknya memuat hal-hal, di antaranya berkaitan dengan:

a. Uraian tentang kemampuan BI dalam menjamin diversitas sosial, seperti kenyataan memasuki era kemerdekaan masyarakat Indonesia terstruktur dalam struktur yang sangat kompleks, namun BI mampu menunjukkan peran yang signifikan sebagai identitas nasional.

b. Hal itu dapat ditunjukkan dengan uraian pembuktian perkembangan jumlah pemakai bahasa Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, misalnya dapat mengutip temuan Ricklefs (2005) yang menyatakan jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI meningkat tajam:

1. tahun 1950 jumlah yang mampu membaca dalam BI: 500.000 orang,
2. tahun 1956 menjadi 933.000 orang,
3. awal tahun 1970-an menjadi 40,8% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu,
4. berdasarkan Sensus Penduduk 1980 jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI meningkat menjadi 61%, dan berdasarkan Sensus Penduduk 1990 jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI menjadi 80%.

c. Uraian yang memuat bahwa masalah bahasa adalah masalah yang menyangkut identitas utama dari sebuah bangsa dengan menunjukkan bagaimana bangsa Israel demi sebuah identitas bagi negara tersebut mereka menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang telah punah untuk dijadikan bahasa negara mereka, kasus Latvia yang menggalakkan pemakaian bahasa Lativi setelah negara itu berpisah dari Uni Soviet 1991, atau bagaimana bangsa Jepang membangun identitas nasionalnya setelah hancur dalam perang dunia kedua dengan menumbuhkan cinta tanah air melalui penerjemahan semua buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang dan lain-lain.

d. Uraian yang memuat koneksitas antara BI dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, yang ditandai oleh kemampuan BI menjadi:

1. bahasa terbaik untuk komunikasi antaretnik, ras, agama;
2. bahasa terbaik menggambarkan realitas keindonesiaan;
3. bahasa yang dapat menjadi refleksi sosial dan bangsa;
4. bahasa yang dapat mencerminkan realitas demokrasi di Indonesia;
5. bahasa yang mampu menjadi salah satu kreator tumbuhnya nasionalisme, yang karenanya fondasi-fondasi kenegaraan dicetuskan seperti: Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi, UUD1945, dan cetusan ideologi bangsa Pancasila, yang semuanya menggunakan BI.

Luasnya cakupan materi Sejarah BI seperti dipaparkan di atas, persoalan yang muncul ialah kapanakah materi itu mulai disajikan. Materi itu sebaiknya disajikan sejak sekolah dasar di tingkat atas (kelas V atau VI sampai ke tingkat perguruan tinggi). Hanya persoalan kedalaman materinya disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikannya.

Selanjutnya, terkait dengan standar isi yang berhubungan dengan pemenuhan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia untuk merefleksikan kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Hal itu penting, karena hasil studi PISA, tahun 2009 maupun 2012 menggambarkan bahwa kondisi siswa Indonesia tidak jauh berbeda, karena Indonesia berada pada posisi terendah setelah Qatar (urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvei untuk tahun 2009) dan berada pada urutan di atas Qatar (urutan 57 pada tahun 2012) dan persentase kemampuan membaca siswa masih dominan pada peringkat menengah ke bawah, bahkan persentase yang relatif sama dan lebih besar berada pada

peringkat/level: 1a dan peringkat/level: 2, sementara yang berada pada peringkat/level menengah ke atas sangat kecil: 1,5% (untuk level 4, tahun 2012) dan 1,0% (untuk level 4, tahun 2009). Hasil studi PISA itu pula menggambarkan bahwa tidak terdapat siswa yang mencapai peringkat 5 dan 6 untuk tahun 2012. Sementara itu, peringkat 3 ke bawah (peringkat: 3, 2, 1b, dan 1a) menunjukkan kemampuan menjawab soal-soal yang bersifat hafalan, karena jawaban atas pertanyaan sudah tersedia di dalam teks. Dengan mengingat teks yang dibaca sebelum menjawab pertanyaannya, siswa akan mampu mencapai skor untuk peringkat tersebut. Adapun peringkat keempat ke atas sudah menggambarkan kemampuan menjawab pertanyaan yang memerlukan pemikiran, karena untuk menjawab soal-soal itu dituntut kemampuan membuat inferensi terhadap hal-hal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam teks. Dengan kata lain, 98,5% dan 99% untuk masing-masing tahun 2012 dan 2009, siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal yang bersifat hafalan. Kecil sekali persentase siswa Indonesia yang mampu menjawab soal yang memerlukan pemikiran. Persoalannya, mengapa anak-anak Indonesia tidak mampu mengembangkan pemikirannya, padahal, pembelajaran bahasa (Indonesia) sudah diajarkan sejak sekolah dasar? Bukankah bahasa selain sebagai sarana berpikir juga sekaligus berfungsi sebagai sarana pembentuk pikiran penuturnya. Dengan demikian, ada persoalan dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama ini.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa menghadirkan negara dalam negara sendiri melalui penguatan identitas yang berupa bahasa negara, perlu diletakkan pada penguatan dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia sebagai basis utamanya. Penguatan tersebut dilakukan dengan mengembangkan materi, metode pembelajaran, dan sistem penilaian capaian hasil pembelajaran yang relevan dan fleksibel. Suatu pengembangan isi, metode, dan sistem penilaian yang tidak terikat pada jenis kurikulum tertentu melalui inovasi pembelajaran. Dalam konteks itu, perlu dikembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada pengembangan struktur berpikir, karena fungsi hakiki bahasa adalah sarana berpikir dan sarana pembentuk pikiran manusia.

b. Penguatan Bahasa melalui Jalur Pendidikan Non Formal/Masyarakat

Pembinaan bahasa yang dilakukan Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan masyarakat, karena sasarannya adalah masyarakat tutur bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, menarik untuk dicermati kondisi pemakaian bahasa di luar ruang di wilayah Indonesia yang hampir-hampir tidak memperlihatkan kehadiran negara di ruang publik. Bertahun-tahun telah dilakukan penyadaran masyarakat melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan bahkan dalam bentuk tatap muka langsung berupa kegiatan penyuluhan bahasa dengan berbagai kelompok sasaran. Apabila kondisi pemakaian bahasa di luar ruang itu, dapat dijadikan indikator capaian pendidikan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan bahasa melalui jalur tersebut belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Dari hari ke hari ruang publik kita banyak diwarnai pemakaian bahasa Indonesia yang kurang tertib, bahkan lebih dari itu masih banyak dijumpai pemakaian bahasa asing yang kurang pada tempatnya. Lalu di manakah letak kegiatan pembinaan bahasa selama ini.

Pembinaan bahasa Indonesia sebagai salah satu bentuk pendidikan masyarakat, dilaksakan tidak berbasis pada hasil kajian. Segmen sosial yang disentuh tidak didasarkan atas hasil analisis situasi. Memang terdapat kajian yang berupa survei pemakaian bahasa di luar ruang, tetapi analisisnya lebih terfokus pada analisis dari aspek substansi kebahasaannya. Bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa itulah

yang menjadi sasaran, sehingga produk akhir dari kegiatan itu berupa senarai padanan kata/istilah bahasa Indonesianya dari kata/istilah asing yang dijumpai dalam pemakaian bahasa di luar ruang. Ada kegiatan penyuluhan bahasa sebagai bentuk tindakan lanjutan dari hasil pemantauan pemakaian bahasa, tetapi sarannya bukanlah orang atau pihak yang memproduksi bahasa-bahasa di luar ruang tersebut. Hal ini disebabkan hasil survei tidak mengidentifikasi segmen sosial yang memproduksi bahasa di luar ruang. Yang diidentifikasi adalah aspek kebahasaannya.

Analisis aspek kebahasaan memang sangat penting untuk penyiapan bahan pembinaan, tetapi yang tidak kalah penting ialah ke pihak manakah materi itu akan disampaikan. Antara realita kebahasaan dengan pencipta realita tersebut bagaikan dua sisi dari mata uang. Keduanya penting dalam rangka pelaksanaan pendidikan kebahasaan melalui jalur pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah pendekatan pelaksanaan pembinaan atau pendidikan masyarakat tersebut. Jika pendekatannya hanya mengandalkan model tatap muka, dialog, yang berlangsung secara eksidental, tidak terencana, terarah, dan terukur maka kegiatan pendidikan/pembinaan itu bagaikan menggarami lautan. Untuk itu diperlukan inovasi pendekatan pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia yang lebih terencana, terarah, dan terukur dan lebih ke arah membangun partisipasi khalayak sasaran. Perlu penyadaran atas pentingnya bahasa Indonesia dalam membangun keindonesiaan. Materi-materi yang non substantif tetapi menyadarkan khalayak sasaran akan pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu disajikan. Pendeknya, materi-materi tentang peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun bangsa seperti yang disajikan untuk materi pada pendidikan formal haruslah disajikan sebagai materi pendamping materi substansi kebahasaan. Selain itu, materi tentang potensi disintegrasi bangsa dari aspek kebahasaan patut pula disajikan, seperti materi segmentasi kewilayahan Indonesia berdasarkan politik kebahasaan. Materi yang bersifat membangun kemauan yang kuat untuk bersikap positif terhadap bahasa negara ini penting untuk mengajak masyarakat mengawasi dan meluruskan pemakaian bahasa di sekitar mereka. Mereka mengidentifikasi persoalan kebahasaan yang ada di sekitar mereka dan mereka pula yang mencari pemecahannya. Model pendidikan masyarakat yang bersifat partisipatori memberi keleluasaan pada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan berbahasa Indonesia mereka dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, membangun potensi kesadaran bernegara melalui kesadaran berbahasa negara secara tertib pada setiap warga masyarakat Indonesia merupakan model pendidikan masyarakat yang dipandang efektif. Untuk itu diperlukan data dan pengelolan data ihwal pihak yang terlibat dalam memproduksi bahasa di luar ruang di samping data kebahasaannya sendiri.

c. Penguatan Bahasa Indonesia di Luar Negara

Sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, keberadaan Indonesia tidak cukup hanya kuat di dalam negaranya sendiri, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari negara lain. Salah satu bentuk pengakuan itu adalah diterimanya keberadaan bahasa sebagai identitas dan jati diri bangsa. Wujud pengakuan tersebut adalah dibelajarkannya bahasa Indonesia di negara itu. Artinya, semakin banyak negara yang belajar bahasa Indonesia, berarti semakin banyak negara yang mengakui keberadaan Indonesia. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara menjadi sarana diplomasi bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun kemandirian bangsa di mata dunia.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap negara-negara yang membelajarkan bahasa Indonesia untuk warganya, melalui surat-menyurat dengan KBRI/KJRI pada tahun 2012 – 2013, diperoleh informasi bahwa terdapat 174 pusat pembelajaran bahasa Indonesia, yang tersebar di 45 negara. Tempat-tempat pembelajaran itu berupa universitas, KBRI/KJRI, lembaga kursus. Negara-negara yang menjadi tempat pembelajaran bahasa Indonesia menyebar di Benua Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika dengan kondisi bervariasi.

Selain dukungan banyaknya negara penyelenggara BIPA di luar negara, terdapat juga daya dukung lain yang dapat mempercepat keberterimaan bahasa Indonesia di luar negara, yaitu (a) tersedia perangkat hukum yang menjadi payung penyebaran bahasa Indonesia di luar negara (UU Nomor 24 Tahun 2009); (b) tersedia substansi dasar pengembangan bahan pembelajaran yang berupa sistem bahasa Indonesia standar yang mencakup ejaan, tata bahasa, kamus yang sudah mencapai 90.000 lema ditambah 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu, alat uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI); (c) sistem bahasa Indonesia yang relatif sederhana, tidak mengenal kala seperti bahasa-bahasa Indo-Eropa; (d) muncul organisasi profesi yang bergerak pada tataran non negara yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara, seperti: ASILE dan Westralian Indonesian Language Teacher Association (WILTA di Australia), ACICIS (konsorsium pengajar BIPA di Australia), Consortium of the Teaching of Indonesia (COTI di Amerika), Himpunan Penguji Bahasa Indonesia (HIPUBI di Jepang); (e) program beasiswa bagi orang asing dari berbagai negara (Darmasiswa); (f) di dalam negara juga terdapat tidak kurang 93 lembaga penyelenggara BIPA yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yang berupa perguruan tinggi, lembaga kursus, organisasi profesi (APBIPA). Namun demikian, bukan berarti tanpa tantangan.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyebarluasan bahasa Indonesia yaitu (a) sikap sebagian masyarakat Indonesia yang belum positif terhadap bahasa Indonesia, (b) didukung oleh sikap pemerintah belum menjadikan bahasa Indonesia sebagai prioritas dalam rangka pengembangan diplomasi halus (*soft diplomacy*); (c) kurangnya koordinasi antarpihak terkait dalam negeri dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia sehingga keberadaan institusi resmi negara yang menangani masalah kebahasaan (Badan Bahasa) bukan merupakan satu-satunya pintu utama pengelolaan masalah kebahasaan; (d) kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pendukungnya belum memadai; (e) pemberian beasiswa bagi warga negara asing serta persyaratan tenaga kerja asing belum menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai salah satu persyaratan; (f) kuatnya kesan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu varian/dialek bahasa Melayu (sama dengan bahasa Melayu di Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura), karena peran pakar asing yang lebih memilih topik kajiannya bahasa Melayu, menyebabkan marwah bahasa Indonesia ter subordinasi di bawah bahasa Melayu. Kesan ini diperkuat masih ada sebagian masyarakat Indonesia termasuk para pemimpin bangsa yang menerima pandangan itu, karena keterbatasan pemahaman. Masih berjalannya kerja sama kebahasaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Mabbim), juga turut memperkuat kesan tersebut.

Dalam rangka mempertegas identitas keindonesiaan, yang salah satunya berupa bahasa nasional, bangsa Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Ekonomi Eropa (Uni Eropa), yang setiap negara menyatakan secara tegas tentang identitas mereka. Bahasa nasional negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Uni Eropa diakui sebagai bahasa resmi. Artinya, setiap negara mempertegas kemandirian mereka sebagai sebuah negara bangsa. Dalam hubungan

dengan itu, piagam kerja sama Asean yang sudah ditandatangani 2007 yang di dalamnya memuat bahasa kerja sama Asean adalah bahasa Inggris belum terlambat untuk ditinjau kembali. Sangat menarik untuk direnungkan, bagaimana Austria yang perbedaan bahasanya dengan bahasa Jerman hanya terjadi pada 23 kosakata yang menyangkut bidang makanan meminta agar diakui sebagai varian yang berbeda dengan bahasa Jerman sebagai persyaratan untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Tuntutan Austria itu dimuat dalam piagam Uni Eropa, protokol Nomor: 10. Di samping itu, pemerintah perlu meninjau kembali kerja sama kebahasaan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam, karena semakin kurang efektif.

Seiring dengan itu, pembenahan hal-hal yang bersifat substantif kebahasaan sebagai komponen utama dan penting bagi upaya memperlancar proses penyebaran bahasa negara, seperti materi pembelajaran BIPA yang sesuai kebutuhan dan peringkat pembelajar, media pembelajaran, alat evaluasi hasil pembelajar, kualitas tenaga pembelajar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu diperlukan data dan pengolahannya berupa tingkat variasi kemampuan berbahasa penutur asing secara umum untuk mengembangkan bahan BIPA berjenjang.

Selain itu, perlu dirancang berbagai bentuk program kemitraan antarpemangku kepentingan BIPA untuk memfasilitasi lembaga BIPA di luar negeri, antara lain, melalui penyediaan dan pelatihan tenaga pengajar serta penyediaan perangkat pembelajaran, seperti kurikulum, silabus, dan bahan ajar. Hal lain yang tidak kalah penting adalah payung hukum yang menyangkut kebijakan-kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, dan prosedur operasional standar sebagai landasan dan acuan pengembangan program BIPA. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu difasilitasi terbentuknya lembaga yang menjadi wadah segala bentuk kegiatan yang menunjang upaya penyebaran bahasa negara melalui pembelajaran BIPA di berbagai negara, baik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI/KJRI maupun yang dikelola lembaga swasta negara setempat. Lembaga yang diusulkan tersebut secara konkret berbentuk institut bahasa Indonesia.

Perlu memaksimalkan peran (a) KBRI/KJRI/Atdikbud, (b) Perguruan tinggi di LN, (c) WNI yang menjadi *permanent resident* di LN, (d) Pemerhati studi Indonesia di LN, (e) WNI yang belajar, bertugas, dan bekerja di LN, (f) WNA peneliti tentang Indonesia (g) WNA yang belajar, bekerja, dan berwisata di Indonesia, (h) Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, (i) Media cetak dan elektronik asing yang berhaluan Indonesia, (j) Negara yang berpotensi menjadi investor di Indonesia, dan (k) Perwakilan Negara Asing (kedubes/konsulat) yang ada di Indonesia, serta (l) WNA yang menikah dengan orang Indonesia dan menjadi WNI sebagai agen penyebaran bahasa negara.

Kemudian, dalam hubungannya dengan munculnya kesan bahasa Indonesia ter subordinasi bahasa Melayu, perlu digalakkan kajian Indonesia dengan melibatkan para indonesianis, sehingga resonansi tentang bahasa Indonesia mampu menembus wacana akademik dunia. Termasuk dalam hal itu, adalah pembuktian tentang asal orang-orang Austronesia dari wilayah Indonesia, bukan dari Indocina atau Melanesia perlu digalakkan, karena seiring dengan itu hipotesis tentang lokasi atlantis, sebuah benua yang menjadi pusat peradaban dunia dalam legenda Plato, akan saling mendukung dengan bukti peradaban Austronesia awal.

4.2.2 Pemanfaatan Data Kebahasaan dalam Membangun Kemandirian Bangsa melalui Penguatan Peran Bahasa Lokal/Daerah

Berdasarkan pemetaan bahasa sampai 2014 diperoleh gambaran di Indonesia terdapat 659 bahasa lokal/daerah. Keberadaan bahasa-bahasa tersebut sebagian besar terancam kepunahan. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan bahasa-bahasa daerah itu terancam punah, yaitu:

- a. Sebagian besar bahasa itu memiliki penutur di bawah 1.000 jiwa. Bahasa-bahasa dalam kondisi ini banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Halmahera, Papua, dan Papua barat;
- b. Globalisasi mendorong kelas menengah, baik di perkotaan maupun di perdesaan, merasa bergengsi menggunakan bahasa asing, sehingga cenderung meninggalkan bahasa ibu mereka, yang berupa bahasa lokal/daerah;
- c. Proses nasionalisasi bahasa negara, bahasa Indonesia, cenderung meminggirkan keberadaan bahasa-bahasa lokal/daerah;
- d. Pengembangan bahasa daerah, khususnya pengembangan daya ungkap (kamus), pengembangan tata bahasa, ejaan, masih belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah seiring era otonomi daerah. Hal itu pula didorong kurangnya kemauan Pemda setempat untuk mendukung bahasa daerah sebagai materi muatan lokal pada pendidikan formal.

Kondisi bahasa lokal/daerah yang sebagian besar mengkhawatirkan itu perlu mendapat perhatian, karena keberadaannya sangat bermanfaat:

- a. Sebagai bukti untuk memahami kandungan makna semboyan negara bangsa “Bhinneka Tunggal Ika”, karena secara historis, bahasa-bahasa serumpun memelihara unsur-unsur kebahasaan yang memperlihatkan pertalian bahasa-bahasa tersebut satu dengan yang lainnya.
- b. Sebagai pembentuk pikiran penuturnya, bahasa-bahasa daerah yang menjadi bahasa pertama anak bangsa Indonesia dapat menyediakan bukti penjejukan cara pandang suku-suku bangsa pemilikinya. Pemahaman akan cara pandang suku-suku bangsa itu tidak hanya menjelaskan cara pandang terhadap keberadaan suku bangsa itu secara internal, tetapi juga memuat gambaran cara pandang suku bangsa itu terhadap suku bangsa lain yang berkontak dengannya. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam terminologi yang menyangkut, misalnya stereotipe, ungkapan-ungkapan dan lainnya. Pemahaman atas cara pandang suku bangsa dengan sendirinya dapat menjadi pintu masuk memahami perilakunya. Sementara itu, pemahaman atas cara pandang yang memengaruhi perilaku dapat menjadi titik masuk bagi pemahaman antarsuku bangsa dalam rangka membangun komunikasi sosial menuju integrasi sosial dan integrasi bangsa.
- c. Menjadi sumber pendukung dan pemer kaya bahasa nasional/negara, terutama menyangkut pemer kaya daya ungkap yang mencerminkan kondisi sosial budaya dan ilmu pengetahuan tradisional. Semakin terbuka ruang bagi kontribusi bahasa daerah itu pada upaya mendukung dan memper kaya daya ungkap bahasa negara, semakin memunculkan kepercayaan penuturnya terhadap keberadaannya dalam NKRI. Kondisi ini dapat dijadikan modal sosial dalam membangun kebersamaan bangsa.
- d. Bahasa daerah yang kaya akan daya ungkap yang mengandung dimensi afektif, emosional, sistem tingkat tutur, sistem honorifik (bentuk hormat) dapat menjadi sarana penumbuhan budi pekerti anak bangsa. Dalam konteks ini, cerita-cerita lokal, dongeng-dongeng lokal, legenda dengan berbagai kearifan tokoh yang digambarkannya dapat menjadi sumber literasi sekolah yang menginspirasi siswa untuk berperilaku arif dan santun.

Kekayaan berupa modal sosial bangsa yang terpendam dalam potensi bahasa dan sastra daerah/lokal haruslah dilindungi, dibina, dan dikembangkan. Perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah mestinya diletakkan dalam satu kerangka kebijakan politik bahasa nasional yang holistik. Kerangka kebijakan tersebut dapat memberikan arah bagi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dalam empat kerangka strategis, yaitu:

- a. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur pendidikan;
- b. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur penguatan partisipasi masyarakat. Jadi, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang bersifat partisipatori;
- c. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur konservasi/dokumentasi;
- d. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui kajian kekerabatan antarbahasa untuk menemukan keterhubungan satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan kerangka kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur pendidikan. Hal-hal tersebut adalah (a) pengidentifikasian bahasa-bahasa daerah yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan formal, terutama terkait persyaratan keberadaan peserta didik; (b) pengembangan tenaga pendidik; (c) pengembangan substansi bahan pembelajaran.

Pengidentifikasian peserta didik sangat penting karena kondisi jumlah penutur bahasa daerah yang sangat bervariasi, ada yang jumlah penuturnya banyak dan ada yang jumlah penuturnya kecil. Bagi bahasa yang jumlah penuturnya kecil seperti kondisi sebagian besar bahasa-bahasa daerah di kawasan timur Indonesia tentu kurang tepat untuk dikembangkan sebagai materi pembelajaran melalui jalur pendidikan formal. Bahasa-bahasa daerah semacam ini hanya dapat dilindungi, dibina, dan dikembangkan melalui jalur kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang bersifat partisipatori dan/atau jalur kebijakan konservasi/dokumentasi. Bagi bahasa-bahasa daerah yang penuturnya kecil dan tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah geografis dapat digolongkan sebagai bahasa yang sangat kritis dan hanya dapat dilindungi melalui jalur kebijakan konservasi/dokumentasi, seperti bahasa Tandia yang penuturnya hanya tinggal 3 orang (2012) dan hidup terpisah dalam geografi yang berbeda.

Dalam kaitan dengan penyediaan tenaga kependidikan perlu dipertimbangkan keberadaan institusi kependidikan yang menghasilkan pendidik bahasa daerah serta kebijakan pengangkatan dan sertifikasi pendidik bahasa daerah. Sangat langka perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa daerah, sehingga mengakibatkan langkanya pengajar bahasa daerah. Hal itu telah mendorong pemerintah daerah kurang memberi perhatian bagi upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah yang terdapat di wilayahnya melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, perlu kebijakan penanganan masalah ketersediaan pendidik bahasa daerah dengan memanfaatkan sarjana bahasa Indonesia melalui pendidikan tambahan untuk keahlian dalam pembelajaran bahasa daerah, jika pembukaan jurusan bahasa daerah pada perguruan tinggi yang ada kurang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kemudian terkait dengan pengembangan substansi bahan pembelajaran hendaknya dilakukan tahapan-tahapan penyediaan: (a) pengembangan kurikulum dan (b) pengembangan materi yang dapat dilakukan melalui kajian variasi dialektal, kajian

aspek kebahasaan bahasa daerah yang mencakup aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta teks/pragmatik. Kajian dari aspek variasi dialektal ditujukan untuk menetapkan varian dari bahasa daerah itu yang akan disepakati sebagai bahasa standar. Adapun kajian dari aspek fonologi ditujukan untuk mengembangkan sistem ejaan standar/baku yang akan digunakan dalam sistem tata tulis; kajian aspek morfologi, sintaksis, dan semantik, serta teks/pragmatik ditujukan untuk mengembangkan tata bahasa standar/baku bahasa daerah tersebut. Kajian lain yang tidak kalah penting adalah kajian sistem leksikal untuk mengembangkan kamus standar bahasa daerah tersebut.

Patut ditambahkan bahwa dalam rangka pengembangan materi pembelajaran hendaknya memanfaatkan potensi bahasa sebagai sarana pengembangan kemampuan logika, etika, dan estetika siswa. Ketiga kebutuhan pengembangan diri manusia memang dapat disediakan bahasa. Melalui kemampuan berbahasa secara benar, sesuai struktur logika bahasanya akan membentuk struktur berpikir logis verbal pada siswa. Kalimat-kalimat yang urutannya mengikuti kaidah struktur yang benar, kemudian teks-teks yang dibangun mengikuti struktur teks yang benar juga akan melatih berpikir sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis pada siswa.

Adapun pemenuhan kebutuhan pengembangan etika dapat dilakukan dengan menyeleksi bahan pembelajaran berupa kosakata, kalimat yang mencerminkan varian yang sesuai dengan konteks situasi pemakaiannya. Sebagai contoh, oposisi kosakata halus dan biasa, bentuk hormat perlu diperkenalkan konteks situasi pemakaiannya, sehingga peserta didik mampu melakukan diksi kebahasaan yang disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Siswa dapat menentukan bentuk tuturan tertentu ketika berbicara dengan mitra wicara yang seusia dengannya dan ketika berbicara dengan mitra wicara yang lebih tua, memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari dirinya.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kemampuan estetika, materi-materi kebahasaan yang berupa ekspresi sastra, sejenis pantun, cerita-cerita yang mengandung diksi yang kaya akan nilai-nilai estetis dan moral dapat menjadi bahan pembelajaran. Termasuk ke dalam materi pengembangan kemampuan estetika ini adalah materi “menulis indah”, yang dahulu pada tahun-tahun 1970-an ke bawah menjadi materi utama di jenjang pendidikan dasar. Materi ini perlu dihidupkan kembali, mengingat majunya teknologi komunikasi (komputer, tablet dan lain-lain.), yang dapat menggeser kemampuan menulis dengan tangan. Saat ini cukup langka dijumpai tulisan tangan yang serapi orang-orang tua generasi 1945–1970-an.

Selain itu, materi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah hendaknya menjadi penghela bagi pembelajaran berbagai kearifan lokal, seperti sejarah, budaya, seni, dan keterampilan lokal. Dengan berbasis pada pembelajaran berbasis teks dengan berbagai struktur berpikirnya, materi-materi yang berupa kearifan lokal tersebut dapat dikomunikasikan sebagai substansi isi teks materi pembelajarannya.

Selanjutnya, kebijakan politik kebahasaan yang bersifat partisipatori dimaksudkan sebagai kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa yang penuturnya kecil dan terkonsentrasi pada satu tempat atau beberapa tempat tetapi dalam jumlah yang lebih besar (100–1.000 jiwa). Kemudian penuturnya jarang yang berusia muda, tetapi di atas usia sekolah sehingga tidak dimungkinkan untuk ditempuh kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka implementasi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa bersifat partisipatori ini, kegiatannya didasarkan pada upaya menggugah kemauan penutur untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasanya sendiri. Masyarakat turut memanfaatkan segala potensi sosial budaya untuk menggerakkan kembali fungsi sosial bahasa daerahnya. Dalam hal itu, pemerintah

berperan memfasilitasi kegiatan masyarakat tersebut dalam bentuk penyediaan fasilitas baik yang menyangkut substansi maupun teknis.

Adapun kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa melalui jalur konservasi/dokumentasi dimaksudkan sebagai kebijakan penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan daerah yang sudah punah atau kritis. Sudah punah di sini, tentu dengan catatan masih tersedia dokumen tertulis tentang bahasa-bahasa tersebut, misalnya perlindungan terhadap bahasa Jawa Kuno yang masih menyimpan naskah tertulis. Sasarannya adalah mendokumentasikan bahasa itu dari aspek struktur kebahasaannya atau aspek sosial sesuai dengan jangkauan yang dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang tersedia. Bahasa-bahasa yang dalam posisi kritis, misalnya bahasa yang jumlah penuturnya kecil, tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah tutur atau dapat saja terkonsentrasi pada beberapa wilayah tutur dengan jumlah penuturnya di bawah sepuluh jiwa upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangannya hanya mampu dilakukan dalam bentuk pendokumentasian.

4.2.3 Pemanfaatan Data Kebahasaan dalam Membangun Kemandirian Bangsa melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Keberagaman bahasa merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Mahakuasa. Keberagaman potensi tersebut telah memberi wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya kesatuan bangsa sebab selain merupakan rahmat, keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Dalam kondisi seperti itu, bahasa Indonesia berperan sebagai sarana pemersatu perbedaan tersebut sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis, saling bertenggang rasa, dan hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, bahasa-bahasa lokal/daerah yang dari segi pengelompokan merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa Austronesia, dapat menjadi bukti akan kebenaran semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, karena meskipun beragam suku bangsa yang ditandai oleh keberagaman bahasa lokal, namun sesungguhnya berasal dari satu asal yang sama. Dalam konteks itu, kajian kekerabatan bahasa seperti disebutkan di atas melalui penelusuran bahasa purba yang menurunkan bahasa-bahasa lokal itu dapat menjadi bahan untuk menyusun strategi pemanfaatan bahasa lokal sebagai sarana diplomasi antarsuku bangsa. Sebagai contoh bentuk-bentuk kekerabatan bahasa, yang menunjukkan keberagaman tetapi satu asal dapat ditemukan misalnya dalam peta kekerabatan kata-kata yang menjadi refleksi makna, masing-masing: lima dan dua pada peta berikut ini.

Peta 1 Keberagaman Bentuk untuk Menyatakan Makna Lima



Makna 'lima' pada Peta di atas memperlihatkan bahwa dalam bahasa-bahasa di Indonesia, ternyata kata bermakna lima dapat muncul dalam wujud yang bervariasi sesuai dengan kaidah perubahan bunyi yang dialami dalam masing-masing bahasa. Ada yang muncul sebagai: lima, lime, limo, dima, dimo, dan rim. Semua kata yang menjadi refleksi makna lima, sekalipun berbeda-beda wujudnya tetapi masih dapat dihubungkan pada sebuah asal yang sama, yaitu diturunkan dari bentuk Purba Austronesia *lima. Artinya, berbeda tetapi satu asal.

Peta 2 Keberagaman Bentuk untuk Menyatakan Makna Dua



Peta 2, menggambarkan bahwa makna dua memiliki berbagai varian dalam berbagai bahasa lokal/daerah, yaitu: loro, dua, due, duo, rua, roa, roah, ros, ru, rue. Semua varian itu dapat dihubungkan pada sebuah kata bahasa Austronesia Purba: *Dua. Perubahan menjadi berbagai varian itu sesuai kaidah perubahan bunyi yang berlaku dalam masing-masing bahasa daerah tersebut. Seperti halnya perubahan kata bermakna 'urat' di atas, yang mencolok terjadi adalah perubahan dari bentuk Austronesia Purba: *Dua menjadi bahasa Jawa Modern: loro. Tahap-tahap perubahannya adalah bunyi Austronesia Purba: *D menjadi bahasa Jawa: r, sehingga muncul bentuk bahasa Jawa Kuno: rua. Kemudian, urutan vokal Austronesia Purba: *ua, menjadi: o (lihat juga proses perubahan kata Austronesia Purba: *uRat di atas), sehingga muncul bentuk: ro, misalnya pada bentuk bahasa Jawa: rolas 'dua belas', rongpuluh 'dua puluh'. Selanjutnya, penutur bahasa Jawa kurang suka kata bersilabe satu, lalu bentuk: ro diulang menjadi: roro. Bentuk ini dapat ditemukan pada penutur bahasa Jawa Salira, Banten. Kemudian dari bentuk: roro terjadi proses disimilasi, bunyi: r pada suku kata pertama saling memengaruhi dengan bunyi: r pada kata: roro, sehingga bunyi: r pada silabe pertama berubah menjadi: l, lalu muncullah bentuk dalam bahasa Jawa Modern: loro.

Selain peta kekerabatan bahasa, juga dalam konteks kebijakan bahasa untuk pembuktian semboyan bangsa "Bhinneka Tunggal Ika" dapat dilakukan melalui kajian strategi kesastraan. Hal ini dapat dilakukan karena, jika bahasa yang menjadi medium utama kegiatan bersastra dapat ditelusuri relasi kekerabatannya, maka dengan sendirinya ekspresi sastra daerah yang menggunakan bahasa daerah pun mampu

dirunut kesatuasalnya meskipun berbeda. Kekerabatannya dapat dilihat dari aspek tema, penokohan, karakter, alur cerita dan semua aspek intrinsik sastra lainnya. Sebagai contoh, kisah tentang tema “kebodohan membawa malapetaka” muncul dengan nama dan tokoh yang berbeda pada masyarakat Jawa, Bali, dan Sasak. Cerita itu pada masyarakat berpenutur bahasa Jawa dikenal dengan cerita Joko Bodo, pada masyarakat berpenutur bahasa Bali dikenal dengan cerita I Blog, sedangkan di masyarakat berpenutur bahasa Sasak dikenal dengan nama cerita Loq Sekeq. Nama cerita yang berbeda-beda itu diambil dari nama lokal. Dalam masyarakat Jawa, nama Joko adalah nama khas Jawa seperti: Joko Tingkir, Joko Suryo dan lain-lain., begitu pula nama awal yang dimulai dengan huruf/bunyi I merupakan nama khas daerah Bali, seperti: I Made Suastika, dan nama Loq Sekeq adalah nama khas daerah Sasak. Loq adalah kata sandang semacam: si dan sang dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Sasak disematkan pada nama perempuan. Kata Sekeq, dalam bahasa Sasak berarti satu. Artinya, nama itu adalah nama anak perempuan pertama. Yang menarik adalah, berbeda nama cerita dan tokoh cerita tetapi sama temanya. Kesamaan cara pandang dalam melihat fenomena kebodohan sebagai sesuatu yang tidak baik dan sering membawa malapetaka, sudah menjadi pandangan masyarakat Indonesia. Tidak mungkin sebuah gagasan ceritanya sama jika tidak karena kesatuasalan. Bahwa terjadi perbedaan nama, hanya karena disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, kajian pemetaan dan kekerabatan sastra dapat menjadi ancangan kajian dalam rangka kajian strategi dan diplomasi kebahasaan.

Peta-peta kekerabatan bahasa termasuk sastra di atas dapat menjadi bahan dalam laboratorium Kebhinnekaan bahasa-bahasa di Indonesia. Laboratorium ini akan sangat bermanfaat bagi anak bangsa ini dalam memverifikasi pemahamannya akan konsep Bhinneka Tunggal Ika melalui bukti-bukti kebahasaan termasuk kesastraan yang sangat beragam di Indonesia. Selain itu, laboratorium dapat menjadi media pembelajaran masyarakat Indonesia pada umumnya secara faktual dan empirik bagi kondisi keberagaman bangsa Indonesia. Setiap daerah, melalui unit pelaksana teknis Badan Bahasa dapat mengembangkan laboratorium kebhinnekaan, di samping laboratorium tingkat nasional yang terdapat di pusat. Laboratorium yang terdapat di daerah memuat kondisi keberagaman yang terjadi di wilayah daerah itu sendiri, sedangkan di tingkat pusat laboratorium itu memuat semua keberagaman daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Paling tidak laboratorium itu memiliki dua ruangan utama, sebagai ruangan peragaan dan ditambah satu ruangan simulasi kebhinnekaan dalam ketunggalikaan, yang menjadi tempat permainan kebhinnekaan dalam ketunggalikaan. Ruangan peragaan yang pertama memuat peta-peta bahasa, peta-peta sastra yang menggunakan mediaum bahasa daerah disertai media visualnya. Visualisasi dapat berupa sarana digital yang jika ditekan tombol pada peta bahasa yang merujuk bahasa tertentu, akan muncul film singkat tokoh lokal bahasa itu yang bercakap dengan menggunakan bahasa daerah setempat dengan menggunakan pakaian adat. Kemudian, ketika ditekan tombol sastra akan muncul segala jenis ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa itu, yang jika ditekan pada pilihan jenis sastra tertentu akan muncul film singkat tentang wujud pementasan jenis sastra tersebut. Pada ruangan peragaan kebhinnekaan itu juga tersedia kamus bahasa lokal dalam bentuk digital, kamus-kamus yang menuntun pada penjelasan nama-nama lokal pakaian adat yang digunakan baik oleh tokoh adatnya maupun yang digunakan untuk pementasan jenis sastra tersebut. Ruang kebhinnekaan itu, benar-benar dibuat untuk menciptakan suasana pemahaman akan keberagaman bangsa dari aspek kebahasaan dan kesastraan yang menggunakan medium bahasa itu.

Dengan demikian, setiap orang yang masuk ke ruangan itu benar-benar dibawa ke alam keberagaman bangsa Indonesia.

Ruangan peragaan yang kedua memuat peta yang memberikan pemahaman tentang relasi kekerabatan bahasa dan ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa. Di ruangan itu, dapat ditemukan peta kekerabatan antarbahasa di setiap wilayah berdasarkan wilayah kebahasaan yang memiliki relasi kedekatan, pohon kekerabatan bahasa, serta pohon kekerabatan sastra. Di dalam ruangan itu pula, tersajikan pola penyebaran/migrasi suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia berdasarkan peta bahasa dan peta sastra. Dengan demikian, setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut diharapkan akan terbangun kerangka berpikir bahwa suku-suku bangsa yang beragam itu sesungguhnya memiliki asal yang sama.

Adapun ruangan ketiga, ruang simulasi. Ruang ini merupakan ruang tempat bermain, menguji ketangkasan seseorang untuk memprediksi bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat pada suatu bahasa tertentu, sesuai permintaan dalam petunjuk permainan, dengan memanfaatkan pemahaman kaidah perubahan bunyi yang bersifat teratur dalam bahasa-bahasa lokal/daerah. Setiap orang dapat menguji ketangkasannya dengan yang lain yang nantinya, pihak yang tangkas dalam permainan simulasi itu akan mendapat skor tertinggi. Jadi, semacam permainan *game*, hanya saja bahannya adalah bahasa-bahasa berkerabat. Boleh jadi, perintah dalam simulasi itu tidak hanya menyangkut satuan leksikal yang berkerabat, tetapi juga dapat berupa perintah tentang kaidah yang mengatur perubahan suatu kata dalam satu bahasa daerah ke bahasa daerah lain; dapat pula perintah itu tentang tempat yang menjadi lokasi bahasa itu digunakan.

Kajian strategis yang tidak kalah penting lainnya adalah kajian tentang hipotesis tanah asal penutur Austronesia yang berasal dari Inonesia bukan dari Indocina (Blust, 1984; Blundel, 2009; Billwood, 2000) dan dari Kepulauan Melanesia, Kepulauan Bismark (Dyen, 1962 dan 1965; Murdock, 1964; Terrel, 1981). Kajian ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hipotesis selama ini yang mencanangkan asal peradaban manusia adalah dari Indonesia. Santos (2009), dalam bukunya *Atlantis: The Lost Continent Finally Found*, mengajukan sebuah hipotesis tentang tempat benua dalam legenda Plato itu adalah di wilayah Indonesia. Jika hal itu benar adanya, maka wilayah Indonesia merupakan tempat awal persemaian peradaban manusia di dunia. Pandangan itu, jika beranalog dengan teori laju perkembangan leksikal yang diajukan Dyen (1965), maka dengan banyak ditemukan situs-situs purba di wilayah Indonesia, maka boleh jadi wilayah Indonesia merupakan tempat persemaian peradaban umat manusia, sebagaimana Dyen menyatakan bahwa di wilayah yang memiliki tingkat keberagaman bahasa, wilayah itu dapat dihipotesiskan sebagai pusat persebaran. Oleh karena itu, kajian dari aspek linguistik tentang asal persebaran penutur Austronesia dapat saling mendukung dengan kajian arkeologi di wilayah Indonesia, termasuk kajian tentang situs Gunung Padang dan tentang Atlantis.

5. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa simpulan sebagai catatan penutup berikut ini.

- a. Dipilihnya elemen bahasa sebagai salah satu pengikat nasionalisme keindonesiaan, bukan elemen ras/suku bangsa atau agama membutuhkan kepiawaian bangsa Inonesia untuk mengelola, memanfaatkan data keberagaman bahasa di Indonesia sebagai bahan perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan.
- b. Kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan dengan tujuan menjadikan bahasa sebagai salah satu penopang bangunan negara Indonesia yang memiliki

identitas/jati diri diimplementasikan melalui pemanfaatan dan pengolahan data kebahasaan untuk: (1) membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa nasional/bahasa negara; (2) membangun kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa lokal/bahasa daerah; (3) membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

- c. Pembangunan kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa nasional/negara dapat ditempuh melalui: (1) jalur pendidikan baik formal maupun non formal melalui pembenahan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia yang berorientasi pada pembelajaran bahasa dalam rangka membentuk kemampuan berpikir; (b) menghadirkan bahasa Indonesia di ruang publik dan penyebaran pemakaian bahasa di luar negara dalam rangka menghadirkan negara Indonesia di dalam dan di luar negara.
- d. Pembangunan kemandirian bangsa melalui penguatan peran bahasa dan sastra lokal/daerah dapat ditempuh melalui perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra lokal dalam memperkokoh jati diri bangsa yang beragam.
- e. Pembangunan kemandirian bangsa melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil pengolahan data kebahasaan (bahasa dan sastra) dalam rangka penguatan karakter bangsa yang beragam tetapi satu asal.

Daftar Pustaka

- Anwar, Ahyar. (2008). "Bahasa Indonesia dan Realitas Indonesia". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia ke-IX*, di Jakarta.
- Billwood, Peter. (2000). *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Blundell, David (Ed.). (2009). *Austronesian Taiwan: Linguistic, History, Ethnology, and Prehistory*. Berkeley: The Regents of the University of Berkeley.
- Blust, R. (1984). "The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective". Dalam AP 26: 45-67.
- Duranti, Alessandro. (1007). *Linguistic Anthropology*. Cambridge: The United Kingdom of Cambridge University Press.
- Dyen, Isidore. (1962). "The Lexicostatistical Clasification of the Malayopolynesian." *Language* 38: 38-46.
- Dyen, Isidore. (1965). "A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages", dalam *International Journal of American Linguistics. Memoir, 19 (Jil. 31, No.1)*.
- Foley, William A. (1998). *Anthropolgical Linguistics: an Introduction*. Malden, USA: Blackwell Publishers Inc.
- Hudson, R.A. (1995). *Sosiolinguistik*. Diterjemahkan oleh Rochayah dan Misbach Djamil (1995). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kuan Yew, Lee. (2013). *One Men's View of The World*. Singapore: Straits Times Press.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Mahsun. 2015. *Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis: Sebuah Penantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahsun. 2009. "Linguistik dan Studi tentang Kemanusiaan". Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Linguistik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 24 Januari 2009.

- Mahsun. 2010. *Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murdock, G. 1964. "Genetic Clasification of the Austronesian Languages: A Key to Oceanic Culture" *History 3*: 117-126
- OECD. 2014. What 15-Year-Old-Knows and what They Can Do with What They Know. PISA 2012.
- Santos, Arysio. 2009. *Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Seri Terjemahan Indonesia*. Jakarta Selatan: PT Ufuk Publishing House.
- Terrel, J. 1981. "Linguistics and the Peopling of the Fasific Island." *Journal of the Polynesian Sociaty*, 90: 225-258.

